

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan menganalisis tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018. Sesuai data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Desa Sidoarum menduduki peringkat ke-18 dari 23 desa di Kecamatan Jakenan sehingga Desa Sidoarum termasuk katagori desa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan desa adalah salah satu program utama Pemerintah dalam menunjang Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2) tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Komponen bangsa harus saling bersinergi dan saling mengisi untuk tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional tersebut. Tujuan Pembangunan Nasional tersebut pada hakikatya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses perencanaan pembangunan ini mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan

Nasional disusun secara terpadu oleh Kementerian atau Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan yang paling terkecil dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah pembangunan yang berasal dari suatu desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian terpenting dari Pembangunan Nasional. Usaha peningkatan kualitas sumber daya pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pada pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Menurut Pangalila (2015) ada dua unsur utama dalam proses pembangunan desa yang saling berkaitan yaitu adanya partisipasi dari masyarakat dan pembinaan dari pemerintah. Singkatnya kedua unsur ini baik masyarakat maupun pemerintah saling terlibat langsung dalam proses pembangunan desa.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di perdesaan. Perhatian yang diberikan pemerintah terhadap pembangunan di desa, berdasarkan pada kenyataan bahwasannya desa merupakan tempat beredarnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa serta masyarakat desa, merupakan landasan dasar kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Pembangunan yang ada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus dari aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan

tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat menargetkan desa sebagai ujung tombak pembangunan hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Dana Desa direncanakan sebesar Rp 60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dialokasikan kepada Kabupaten atau Kota dengan ketentuan alokasi dasar sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dibagi secara merata kepada setiap desa, alokasi afirmasi sebesar 3% (tiga persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi, dan alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dana Desa diserahkan langsung ke desa untuk pembangunan desa supaya ada pemerataan untuk mengurangi terjadi urbanisasi yang tinggi. Pada kebijakan ini tentunya Kepala Desa dituntut untuk bijak dan transparan dalam penggunaan Dana Desa dan mampu menyusun kebijakan yang strategis untuk mewujudkan pembangunan di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu cara mensejahterakan masyarakat. Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat

untuk menyatakan aspirasi, dan ikut serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sehingga dengan dana yang besar tadi dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa.

Munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap merupakan satu langkah maju dalam pembangunan Desa. Undang-undang tersebut membuat Desa menjadi perhatian khusus pemerintah pusat agar Desa sebagai sebuah institusi paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi maju berkembang sebagai landasan yang kuat menuju masyarakat yang sejahtera.

Definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adanya Undang-Undang terbaru tentang Desa, membuat desa memiliki kewenangan yang luas serta menjadi sebuah tempat untuk dapat menyampaikan kepentingannya bagi masyarakat. Pembangunan sosial menjadi hal wajib untuk dilaksanakan oleh desa sehingga secara jelas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menyerahkan pelaksanaan pembangunan untuk diurus secara mandiri oleh desa. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan desa yang maju, Pemerintah Desa berhak untuk merencanakan pembangunan desa. Sistem perencanaan pembangunan desa merupakan

satu kesatuan dengan sistem perencanaan Daerah Kabupaten atau Kota. Perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang mengikutsertakan partisipasi seluruh masyarakat di desa. Salah satu fakta yang menunjukkan bahwa pembangunan pada saat ini lebih banyak berfokus di daerah pedesaan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bertempat tinggal di daerah desa.

Salah satu Langkah maju dalam pembangunan Desa adalah terjadinya suatu kolaborasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat demi terwujudnya suatu kesejahteraan. Pemerintah Desa maupun masyarakat merupakan dua sisi yang harus terlibat dalam pembangunan Desa. Untuk mewujudkan pembangunan Desa, kedua sisi tersebut harus saling bekerja sama satu sama lain.

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat Desa yang dibantu perangkatnya. Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 26 ayat (2) bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa adalah sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan desa dan menetapkan peraturan desa, mempunyai kewenangan dalam mengangkat serta memberhentikan perangkat desa, pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), membina dan membangun kehidupan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Dalam organisasi tidak lepas yang namanya memimpin dan dipimpin. Secara umum pemimpin diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keterampilan teknis dalam sebuah bidang, sehingga dapat mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan tugas dan tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi merupakan salah satu factor yang dapat menilai kualitas suatu kepemimpinan seseorang. Pemimpin yang memiliki semangat yang tinggi juga mempengaruhi kinerja pegawai dalam sebuah organisasi. Menurut Fathoni (2015) mendefinisikan seorang pemimpin yang berhasil dalam menjalankan perannya, dilihat dari aspek apakah pemimpin tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang menciptakan serta menggerakkan anggotanya dalam lingkup kerja dengan mendorong dan mengembangkan pertumbuhan kinerja anggota dalam mencapai suatu tujuan yang ada.

Kepala Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa.

Dalam era otonomi saat ini setiap penyelenggaraan pembangunan dari tingkat Nasional maupun Desa di seluruh Indonesia harus melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Dalam menyelenggarakan aktivitas pembangunan dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mendorong partisipasi masyarakat. Kinerja Kepala Desa sangat menentukan dalam pembangunan desa yang berkaitan dengan keberhasilan atau gagalnya dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa yang menjalankan fungsi kepemimpinan mulai dari perencanaan, penggerak, pemotivasi, mengarahkan, komunikasi dalam proses pembangun Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, Kepala Desa juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat juga bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan di desa khususnya di Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan.

Desa Sidoarum dengan segala potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan ditopang kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan pada daerah perdesaan tentunya dapat menjadi desa yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi. Desa Sidoarum dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama bapak

Mulyono, beliau berumur 40 tahun. Bapak Mulyono sudah memimpin desa Sidoarum sejak tahun 2014 sampai 2019, dan beliau memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Beliau merupakan warga asli Desa Sidoarum yang diharapkan dapat membina dan memimpin desa Sidoarum dengan baik, sesuai dengan visi dan misi saat beliau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidoarum.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 Oktober 2019 diperoleh bahwa Desa Sidoarum memiliki sumber daya alam yang berupa lahan persawahan seluas 167,612 Ha, secara garis besar sumber daya alam Desa Sidoarum mempunyai potensi yang tinggi. Hal ini tentunya menjadi point penting dalam konteks pembangunan dari desa tersebut karena mayoritas masyarakat Desa Sidoarum adalah petani.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Pada prosesnya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, kepala desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat juga memiliki campur tangan dalam suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari

pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan di desa khususnya di Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan.

Berikut ini adalah tabel Rencana Kerja Pembangunan Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Tahun 2018:

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pembangunan di Desa Sidoarum Tahun 2018

No	Pembangunan	Sumber Dana	Sasaran Manfaat
1	Balai Desa	ADD/DD/BANPROV	Kelancaran Pemerintahan
2	Pengaspalan Jalan Desa	ADD	Transportasi
3	Sarana Pendidikan	ADD	Masyarakat Desa
4	Sanitasi Air Perkampungan	DD	Masyarakat Desa
5	Irigasi Pertanian	DD	Petani
6	Penerangan Jalan	PAD	Masyarakat Desa
7	Talud Jalan	BANPROV	Transportasi

Sumber: Data RKP Desa Sidoarum 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2018 di fokuskan ke pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan pra-riset peneliti tanggal 26 September 2019, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat Desa Sidoarum beliau mengatakan bahwa pembangunan yang ada di Desa Sidoarum sudah ada yang berjalan, akan tetapi menurut beliau dari perencanaan pembangunan di Desa Sidoarum yang telah berjalan hanya seperempat bagian dari seluruh rencana pembangunan desa dan masih banyak pembangunan yang ada di Desa

Sidoarum sampai sekarang belum terlaksana. Banyaknya pembangunan yang masih belum terlaksana dikarenakan tidak adanya koordinasi antar aparat pemerintah desa dalam proses pembangunan desa.

Pembangunan desa ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, dan sosial, dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan desa yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan terlaksana dengan baik. Pembangunan yang ada di desa dititik beratkan pada pembangunan fisik yang terdiri dari pembangunan balai desa, jalan kampung dan lain-lain. Selain itu pembangunan desa juga melihat bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang ada pada suatu desa tersebut. Pembangunan desa harus di dukung oleh berbagai aspek komponen yang ada di desa agar pembangunan yang ada di desa tersebut dapat berjalan optimal dan dirasakan oleh masyarakat yang luas.

Selain warga masyarakat Desa Sidoarum, peneliti juga mewancarai salah satu aparat di Desa Sidoarum yaitu pernyataan dari Bapak Sugondo selaku Kepala Dusun Desa Sidoarum yang mengatakan bahwa beliau tidak terlibat langsung dalam proses pembangunan fisik yang ada di Desa Sidoarum, karena kesibukan beliau sebagai petani desa dan tidak memahami tupoksi dari pembangunan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa Perangkat Desa Sidoarum hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal inilah yang mengakibatkan beliau dan perangkat desa lainnya menyerahkan proses pembangunan fisik desa tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Dari pernyataan diatas, peneliti melihat bahwa aparatur di Desa Sidoarum memiliki riwayat pendidikan rendah dilihat dari banyaknya perangkat desa hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dianggap peneliti berdampak besar terhadap proses pembangunan yang ada di Desa Sidoarum. Perangkat Desa yang tidak memiliki kemampuan dalam bidangnya serta kurangnya peran Kepala Desa sebagai pemimpin mengakibatkan tidak terjalannya komunikasi yang baik sehingga dalam proses pembangunan desa tidak berjalan dengan baik.

Kepala Desa yang seharusnya menjadi mentor penggerak dalam pelayanan publik mestinya dapat menjalankan roda pemerintahannya terutama dalam hal pelayanan publik. Kepemimpinan seorang Kepala Desa menentukan arah pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada pada suatu desa harus mengikutsertakan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Pembangunan yang efektif dan efisien harus dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kepemimpinan kepala desa harus dapat mengikutsertakan aparatur pemerintah yang lain dan masyarakat yang ada di dalamnya demi terciptanya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian singkat diatas peneliti tertarik untuk meneliti “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018? “

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

141. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya tentang mengkaji permasalahan kepemimpinan dalam memahami dan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

142. Manfaat Praktis

Hasil penelitian semoga dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran di Pemerintahan Desa Sidoarum. Bagi Peneliti, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah melalui teori-teori yang didapat dalam aspek pemerintahan dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan proses penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Achmad Nur Haida (2015)	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Karangpatihan	Peran dalam membuat kebijakan dilaksanakan melalui identifikasi masalah infrastruktur, persepsi masyarakat, ketergantungan terhadap bantuan, dan keterampilan. Masalah tersebut dijadikan landasan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan dalam bidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Faktor penghambat kepemimpinan kepala desa antara lain komunikasi antara pelaksana dan masyarakat miskin dan orang dengan retardasi mental, anggaran dan periode kepemimpinan kepala desa. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya kelompok masyarakat, dukungan karangtaruna, dan pelatihan dari BLK untuk masyarakat miskin dan orang dengan retardasi mental.
2	Solichin, Samsul Akmal (2018)	Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa tergolong baik dalam pembangunan infrastruktur, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya informasi tentang anggaran dana desa berikut detail pengeluaran dana yang tidak bisa ditekan seminimalisir mungkin, karena manajemen pengelolaan pemerintah desa belum optimal.
3	Abdul Malik Karim Amrulloh, Hengky Pramusinto (2017)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Fasilitas Kantor, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Se-Kecamatan Sukorejo	Pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala desa, fasilitas kantor, dan kompensasi terhadap kinerja perangkat desa se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal secara simultan.
4	Beny Hasgoro (2014)	Kepemimpinan Kepala Desa Kampungbaru Dalam	Kepemimpinan kepala desa berdasarkan hubungan pemimpin dengan bawahan

		Pembangunan Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk	cukup baik, dan Kepemimpinan Kepala Desa Kampungbaru berdasarkan struktur tugas dilihat memang baik, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi agar tugas terlaksana dan tepat sasaran, sedangkan Kepemimpinan Kepala Desa Kampungbaru berdasarkan posisi kewenangan pemimpin memang bagus tetapi banyaknya pelanggaran yang dilakukan bawahan merupakan kekurangan yang perlu dibenahi. Di dalam Kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kampungbaru masih banyak yang harus dilakukan evaluasi sekaligus perubahan baik dari segi suprastruktur, bawahan maupun gaya kepemimpinan yang diterapkan.
5	Devi Mulyana (2015)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013	Kepala Desa Dendun sudah berperan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013. Adapun yang dapat disarankan kepada Kepala desa agar dapat berperan lebih baik lagi, maka dipaparkan sebagai berikut seharusnya pemimpin sering melakukan pengawasan tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga pada sumber-sumber pendapatan yang dapat menunjang pembangunan seharusnya Kepala Desa lebih sering melibatkan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan agar dapat mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat desa Dendun.
6	Wela Harni dan Agung Suprojo (2016)	Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa	Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan baik dengan dilihat dari berbagai aspek. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa yaitu cara berpikir masyarakat untuk meningkatkan SDM, partisipasi, taraf pendidikan, kerja sama yang baik, serta rasa tanggung jawab bersama yang masyarakat dan perangkat desa. Adapun gaya kepemimpinan kepala desa sangat mendukung berjalannya visi misi.

7	Waloyo (2016)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Laban Kulon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, walaupun belum sepenuhnya maksimal mampu memberikan pembangunan yang cukup baik terhadap peningkatan pelayanan, namun secara aplikatif peran kepemimpinan kepala Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik termasuk baik. Namun pada pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan yang harus dihadapi sesuai dengan persyaratan peningkatan kinerja aparatur Desa, seperti kurang mendukungnya sarana prasarana dan dukungan sosial ekonomi meskipun mendapat dukungan dari luas wilayah dan jumlah penduduk
8	Monita Oktavia & Prayetno (2018)	Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	Kondisi pembangunan infrastruktur di desa Rianiate dibawah kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan infrastruktur sebuah desa tergantung pada peran kepala desa dalam membina dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kepala desa harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai motivator, fasilitator, menerapkan prinsip transparansi, disiplin, adil dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pembangunan desa. Pembangunan di Desa Rianiate sudah cukup sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Kepemimpinan kepala desa secara umum sudah baik meskipun masih kurang maksimal. Kepemimpinana tersebut sudah melekat dalam diri kepala desa Rianiate. Pada sisi lain, temuan dilapangan masih ditemukan beberapa masyarakat yang enggan terlibat dengan kecenderungan mementingkan urusan pribadi.
9	Dhian Safitri (2019)	Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo Dalam Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik.	Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah menerapkan asas akuntabilitas, asas keterbukaan dan

			transpransi, asas partisipasi dan asas responsif. Pertama, Pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kedua, masyarakat desa Gunungrejo mengetahui apa saja kebutuhan dana yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan desa melalui musrembangdes. Ketiga, Kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dalam membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Keempat, Kepala desa Gunungrejo sudah berupaya melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam sarana dan prasarana
10	Dwi Titiawati (2017)	Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan.	Kepala Desa Hanura memiliki Sembilan strategi yang menjadi tonggak keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik didesa. Sehingga menghasilkan Desa Hanura sebagai desa contoh bagi desa-desa yang ada di Pesawaran tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu membahas mengenai strategi kepemimpinan kepala desa dalam menyesejahterakan masyarakatnya, banyak strategi yang di terapkan untuk menunjang kehidupan masyarat khususnya dalam hal pembangunan desa. Melalui anggaran APBDes ataupun Dana Desa yang di turunkan oleh Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian yang terdahulu juga membahas peran kepemimpinan kepala desa dalam mengimplementasikan anggaran untuk pembangunan desa serta transparansi kepala desa dalam mempublikasikan anggaran dan perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat sesuai regulasi yang mengaturnya.

Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu yang sudah di paparkan di atas, yaitu strategi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa. Strategi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa membahas bagaimana kepala desa mengimplementasikan anggaran untuk pembangunan desa. Penelitian ini hanya fokus pada pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa sebagai salah satu poin yang ada pada pengolahan dana desa sesuai dengan regulasi yang mengaturnya

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan menurut Martinis Yamin dan Maisah dalam (Andi Yolanda Oktavia Lubis dan Febdri Susanti, 2019) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.

Menurut Mulyasa dalam (astuti, 2015), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Kartini, Kartono (2011, 55) pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin

dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Pengertian kepemimpinan merupakan suatu deskripsi tentang kegiatan seseorang yang dinilai sebagai pemimpin, dan terdapat aspek-aspek sebagai berikut Posisi sebagai pusat, peranannya sebagai pemberi arah, sebagai penggerak atau stimulator dari aktivitas atau kegiatan. Pengertian kepemimpinan lebih dititik beratkan pada segi fungsi dari pada segi struktur.

Menurut Kartini, Kartono (2011, 55) pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Pengertian kepemimpinan merupakan suatu deskripsi tentang kegiatan seseorang yang dinilai sebagai pemimpin, dan terdapat aspek-aspek sebagai berikut:

1. Posisi sebagai pusat;
2. Peranannya sebagai pemberi arah;
3. Sebagai penggerak atau stimulator dari aktivitas atau kegiatan. Pengertian kepemimpinan lebih dititik beratkan pada segi fungsi dari pada segi struktur.

Menurut Sutikno (2014: 35) dalam (Zulfikar 2018) mengatakan tipe-tipe kepemimpinan terdiri atas:

1. Tipe Otokratik

Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain

dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin otokratik akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya, dan selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.

2. Tipe Militeristik

Pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebihan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya. Tipe Paternalistik yaitu seorang pemimpin yang menganggap bawahannya.

3. Tipe Kharismatis

Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki

kharisma. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar.

4. Tipe Laissez Faire

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil.

Beberapa teori kepemimpinan menurut Miftah Thoha (2014: 284-296)

Secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Teori Sifat Kepemimpinan

Teori ini sering disebut juga "*great man*", lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang itu dilahirkan membawa atau tidak ciri-ciri atau sifat-sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin, atau dengan kata lain, individu yang lahir telah membawa ciri-ciri tertentu yang memungkinkan dia dapat menjadi seorang pemimpin. Keith Davis yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2014:290) mengiktisarkan ada 4 (empat) ciri utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi:

1. Kecerdasan,

2. Kedewasaan dan hubungan sosial,
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi,
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan

2. Teori kelompok

Teori ini menyatakan bahwa untuk pencapaian tujuan-tujuan kelompok harus ada pertukaran yang positif antara pimpinan dan bawahannya. Kepemimpinan itu merupakan suatu proses pertukaran (exchange process) antara pemimpin dan pengikutnya, yang juga melibatkan konsep sosiologi tentang peranan yang diharapkan kedua belah pihak.

3. Teori Situasional (contingency)

Setelah baik pendekatan sifat maupun kelompok terbukti tidak memadai untuk mengungkapkan teori kepemimpinan menyeluruh, perhatian dialihkan pada aspek-aspek situasional kepemimpinan, Fred Fiedler telah mengajukan sebuah model dasar situasional bagi efektifitas kepemimpinan, yang dikenal sebagai *Contingency model of leadership effectiveness*. Model ini menjelaskan hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan atau menyenangkan.

Situasi-situasi tersebut digambarkan oleh Fiedler yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2014: 298) dalam tiga dimensi empiri yaitu:

- a. hubungan pimpinan anggota,
- b. tingkat dalam struktur tugas

- c. posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal.

Situasi-situasi itu menguntungkan bagi pemimpin bila ketiga dimensi diatas adalah berderajat tinggi, bila setuasi terjadi sebaliknya maka akan sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Atas dasar penemuannya, Fiedler berkeyakinan bahwa situasi-situasi menguntungkan yang dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan akan menentukan efektivitas pelaksanaan kerja kelompok.

Gaya dasar Kepemimpinan Situasional Dalam hubungannya dengan prilaku pemimpin ini, ada dua hal yang biasanya dilakukan terhadap bawahannya atau pengikutnya menurut Hersey dan Blanchard yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2003:65) adalah prilaku mengarahkan atau prilaku mendukung.

1. Perilaku mengarahkan

Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pengikutnya.

2. Perilaku mendukung

Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Miftah Thoha, (2003:65) Kepemimpinan yang menghubungkan antara perilaku pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dengan menggunakan 4 (empat) Gaya Kepemimpinan Situasional, yaitu:

1. Tinggi Pengarahan dan Rendah Dukungan (Instruksi) Fokus ini dilihat pada tingginya pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilakukan di desa dan melihat dukungan atau partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Tinggi Pengarahan dan Tinggi Dukungan (Konsultasi) Fokus ini dilihat pada tingginya pengarahan yang dilakukan kepala desa dan tinggi dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Tinggi Dukungan dan Rendah Pengarahan (Partisipasi) Fokus ini melihat tinggi dukungan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam pembangunan desa tetapi rendahnya pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengarahkan untuk pembangunan desa.

4. Rendah Dukungan dan Rendah Pengarahan (Delegasi) Dalam hal ini fokus ini melihat pada rendahnya dukungan masyarakat dan rendahnya pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa.

4. Teori Jalan Kecil-Tujuan (*Path-Goal theory*)

Telah diakui secara luas bahwa teori kepemimpinan dikembangkan dan mempergunakan kerangka dasar teori motivasi. Ini merupakan pengembangan yang wajar, sebab kepemimpinan itu erat hubungannya dengan motivasi disatu pihak dan dengan kekuasaan dipihak yang lain. Teori Path-Goal yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2014:302) ini menganalisa pengaruh dampak kepemimpinan (terutama perilaku pemimpin) terhadap motivasi bawahan kepuasan dan pelaksanaan kerja. Teori ini memasukan 4 (empat) tipe atau gaya pokok perilaku kepemimpinan yaitu:

1. Kepemimpinan Direktif (*Directive Leadership*) Bawahan tahu jelas apa yang diharapkan dari mereka dan perintah-perintah khusus diberikan oleh pemimpin. Disini tidak ada partisipasi oleh bawahan (pemimpin yang otokratis).
2. Kepemimpinan yang mendukung (*Supportive Leadership*) Kepemimpinan yang selalu menjelaskan, sebagai teman, mudah didekati dan dan menunjukkan diri sebagai orang yang sejati bagi bawahan. Gaya kepemimpinan ini mempunyai pengaruh yang sangat positif pada kepuasan bawahan yang bekerja dengan tugas-tugas yang penuh tekanan, frustrasi dan tidak memuaskan.

3. Mengajukan tantangan-tantangan dengan tujuan yang menarik bagi bawahan dan merangsang bawahan untuk mencapai tujuan tersebut serta melaksanakannya dengan baik.
4. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi Kepemimpinan menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk berprestasi. Demikian pula pemimpin.

1.6.2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Menurut Wahyudi dalam (Eka Safitri, 2017) Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Raharjo Adismita (2013: 57) tujuan pembangunan desa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembangunan desa jangka Panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina

manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan seperti jalan, jalur kereta api, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan atau irigasi dan bandar udara yang bertujuan untuk pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi dapat berjalan. Menurut Susantono dalam (Mega Lestari 2019) Dengan tersedianya infrastruktur fisik secara memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti

transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Suratno (2010) bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.

Indikator Pembangunan Insfrastruktur dapat dilihat dari Pengukuran efektivitas pembangunan tiap jenis infrastruktur mengadopsi dan memodifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich dalam (Trifandi Ardi Sukrila Layn, 2018) yakni dengan pendekatan teori sistem. Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni Ketersediaan fisik (*availability*), Kualitas fisik (*quality*), Kesesuaian (*appropriateness*), Pemanfaatan (*utility*), Penyerapan tenaga kerja (*job creation*).

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang dalam suatu organissi yang mempunyai keterampilan teknis mampu membuat orang lain disekitarnya melakukan apa yang diperintahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan di organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang memiliki semangat yang tinggi juga mempengaruhi pola kerja anggotanya dalam sebuah organisasi.

1.7.2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

desa. Pembangunan di desa jadi prioritas utama untuk program pemerintah dalam rangka Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah, karena banyak warga masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan. Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi urbanisasi masyarakat desa.

1.8. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidoarum Tahun Anggaran 2018 menggunakan variabel:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Kepemimpinan	1. Perilaku Mengarahkan <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan peranan b. Melakukan Pengawasan c. Memberikan Tugas 2. Perilaku Mendukung <ol style="list-style-type: none"> a. Mendengarkan Aspirasi b. Memberikan Instruksi c. Melibatkan Proses Pengambilan Keputusan
2	Pembangunan Infrastruktur	1. Transportasi 2. Telekomunikasi 3. Sanitasi

1.9. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana model penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

191. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat sekaligus memahami akan fenomena terkait yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan kedalam bentuk kalimat dan bahasa yang memanfaatkan berbagai metode alamiah yang ada. Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Data kualitatif dikatakan cukup apabila semua data yang dibutuhkan oleh peneliti sudah mencakup atau menjawab semua pokok permasalahan yang diteliti. Maka alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018.

192. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2012) dalam menentukan lokasi penelitian harus mempertimbangkan teori, substantif dan menelaah lapangan untuk mencari

kenyataan yang ada serta mempertimbangkan faktor geografis dan praktis. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Pertimbangan pemilihan lokasi karena peneliti ingin mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa tahun 2018.

193. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dikarenakan data primer digunakan sebagai data terbaru yang dibandingkan dengan data sekunder mengenai hasil penelitian yang sama diteliti oleh orang lain:

1. Data primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu atau pokok masalah dalam penelitian kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang Pembangunan Desa Sidoarum yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku atau leteratur, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki Desa Sidoarum.

194 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung dilapangan, wawancara dengan pihak yang terkait, terutama masyarakat dan aparatur desa. Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Menurut sigh (dalam Hakim, 2013) wawancara adalah situasi berhadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Pada penelitian ini peneliti menentukan informan untuk di wawancarai dalam pengumpulan data menggunakan teknik "*Purposive Sampling*" yaitu dipilih berdasarkan

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang mengerti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.

Tabel 1.4 Data Narasumber

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Desa Sidoarum	1 Orang
2	Aparatur Desa Sidoarum	4 Orang
3	Masyarakat Desa Sidoarum	3 Orang
4	Kelompok Ibu PKK Desa Sidoarum	1 Orang
5	Karang Taruna Desa Sidoarum	1 Orang
Jumlah		10 Orang

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dicari melalui dokumen-dokumen, buku, jurnal, skripsi, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian, melalui teknik dokumentasi dokumentasi ini akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada mengenai gmbaran penelitian.

195. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Yusuf, M. A 2014:407) dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Teknik analisis data sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Siklus Teknik Analisis Data



Dalam penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018, peneliti melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian, tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang dibuat oleh peneliti akan dikumpulkan dan disusun secara urut sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018. Pembahasan meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain lainnya.
2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan kerangka dasar teori, dalam kerangka dasar teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena peneliti mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan serta mempermudah arah peneliti dalam penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018.
4. Tahapan selanjutnya mengenai penulis untuk mengumpulkan data primer dengan wawancara dan data sekunder. Peneliti melakukan wawancara untuk

mendapatkan data mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018.

5. Saat melakukan tahapan pengolahan data, peneliti harus memiliki data primer dan sekunder. Sehingga dalam analisis data peneliti mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal agar penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018 dapat bermanfaat bagi pembaca.
6. Analisis data merupakan tahapan untuk menganalisis, mempertajam, memilih, mengokuskan, membuang, data dalam satu cara demi mendapatkan data reduksi yang mengerucut, dimana kesimpulan akhir dari Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018 dapat digambarkan dan diverifikasikan.
7. *Display* data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah terususun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini menggunakan *display* data yang berasal dari Kepala Desa dan Masyarakat Desa Sidoarum.
8. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya. Kesimpulan dapat memberikan

penjelasan mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Sidoarum Kec. Jakenan Kab. Pati Tahun Anggaran 2018.